

## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **1.1 Sejarah Singkat Perusahaan**

Tahun 1978 kantor kami mulai berdiri dengan nama Kursus Penjenjangan dan Latihan Keterampilan Pegawai (KPLKP) Perhubungan Laut, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.53/OT/Phb-1978 tanggal 8 Maret 1978. Kantor KPLKP dijabat oleh 2 (dua) Pejabat Struktural yaitu Kepala KPLKP dengan eselon III/B dan Kepala Urusan Tata Usaha dengan eselon V/B. Sejak tanggal 1 Juli 1979 Kantor KPLKP beralamat di Jl. Donggala No.23 Sampur Koja Jakarta Utara menempati gedung asset Kantor Adpel Tanjung Priok / Ditjen Perhubungan Laut dengan status pinjam. Sesuai surat Menteri Perhubungan (Bp.Rusmin Nuryadin) dengan nomor surat B.603/OT.001/Menhub-84 tanggal 30 Agustus 1984 menyatakan semua asset dari unit-unit Pusdiklat Dasat, Laut, Udara dan Balai MG (termasuk KPLKP) menjadi asset Badan Diklat Perhubungan tetapi pada saat itu belum diserahkan terimakan. Selanjutnya Tahun 1984 tepatnya tanggal 31 Desember 1984 dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Asset dengan nomor UM.54/5/10-84 oleh Pihak Pertama (Dirjen Hubla J.E. Habibie) dan Pihak Kedua (Ka.Badan Diklat Perhubungan Sarwono) maka asset Ditjen Hubla di 8 (delapan) lokasi menjadi milik Badan Diklat Perhubungan.

Pada tahun 1995 terjadi perubahan kebijaksanaan pemerintah bahwa areal Sampur Koja Jakarta Utara akan dibuat pengembangan Terminal Peti Kemas, sehingga terbit surat pemeritahuan dari Direksi PT. (Persero) Pelindo II Tanjung Priok (Dirut A. Harbaini) dengan nomor : TS.11/3/8/PI-2-95 tanggal 4 Desember 1995 perihal Rencana pembongkaran Gedung KPLKP di Jl Donggala No.23 Semper Koja Jakarta Utara. Pada tanggal 30 Juli 1996 Kantor KPLKP Pindah Alamat ketempat sementara di Kampus BP3IP di Jl. Danau Sunter Utara Blok G Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara. Pada tanggal 5 Mei 1998 Kantor KPLKP pindah dari alamat sementara BP3IP ke Gedung /Kantor eks BTKP di Jl. Logistik No.36 A Semper Tugu Selatan Jakarta Utara sesuai surat Kepala Badan Diklat Perhubungan nomor : B.83/UM/106/DL-98 tanggal 5 Mei 1998, namun pelaksanaan pindah pada bulan Pebruari 1999.

Pada Tahun 2002 terjadi perubahan nama kantor dan Struktur Organisasi KPLKP menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 77 Tahun 2002 tanggal 2 Oktober 2002 dan masih berdomisili di Jl. Logistik No. 36 A, Semper, Tugu Selatan, Jakarta Utara, sehingga Kantor BPPTL Jakarta menempati gedung eks BTKP sejak tahun 1999 s/d Tahun 2005.

Perlu disampaikan bahwa proses mendapatkan tempat / lahan untuk gedung / kantor BPPTL Jakarta sangatlah sulit dan lama, karena sejak tahun 1979 s/d tahun 2005 kantor kami sudah 3 (tiga) kali pindah lokasi dengan status menumpang / pinjam. Pada tahun 2002 berbarengan dengan proses reorganisasi kantor KPLKP menjadi BPPTL kami telah berupaya mengusulkan alokasi biaya pengadaan tanah / lahan untuk gedung / kantor BPPTL Jakarta. Pada tahun 2005 Alhamdulillah kami mendapatkan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) – APBN Perubahan untuk pengadaan lahan / tanah, sehingga terealisasi / terwujud di tempat inilah kantor BPPTL Jakarta. Tepatnya tanggal 10 Januari 2006 (10 Djuhijah 1426 H) BPPTL resmi menempati gedung milik sendiri di Jl. M.Kahfi II No.88 Rt.02/05, Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630.

## **1.2 Visi dan Misi Perusahaan**

### **a. Visi**

- Menciptakan para profesional di Sub Sektor Perhubungan Laut dalam mendukung Safety, Speed, Reliability dan System Transportasi Nasional yang bertaraf international

### **b. Misi**

- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang Transportasi laut sesuai standar nasional dan internasional
- Melaksanakan pembinaan sikap, mental, moral dan disiplin kepada peserta Diklat
- Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan sesuai dengan perkembangan
- Melaksanakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

### 1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi adalah suatu struktur sistematis yang menunjukkan susunan pola tetap dan hubungan diantara fungsi-fungsinya, bagian-bagian atau fungsi-fungsinya, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan serta dapat menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan dalam suatu organisasi. Wewenang dan tanggung jawab suatu pimpinan sampai dengan suatu yang paling bawah di dalam suatu organisasi dibedakan atas:

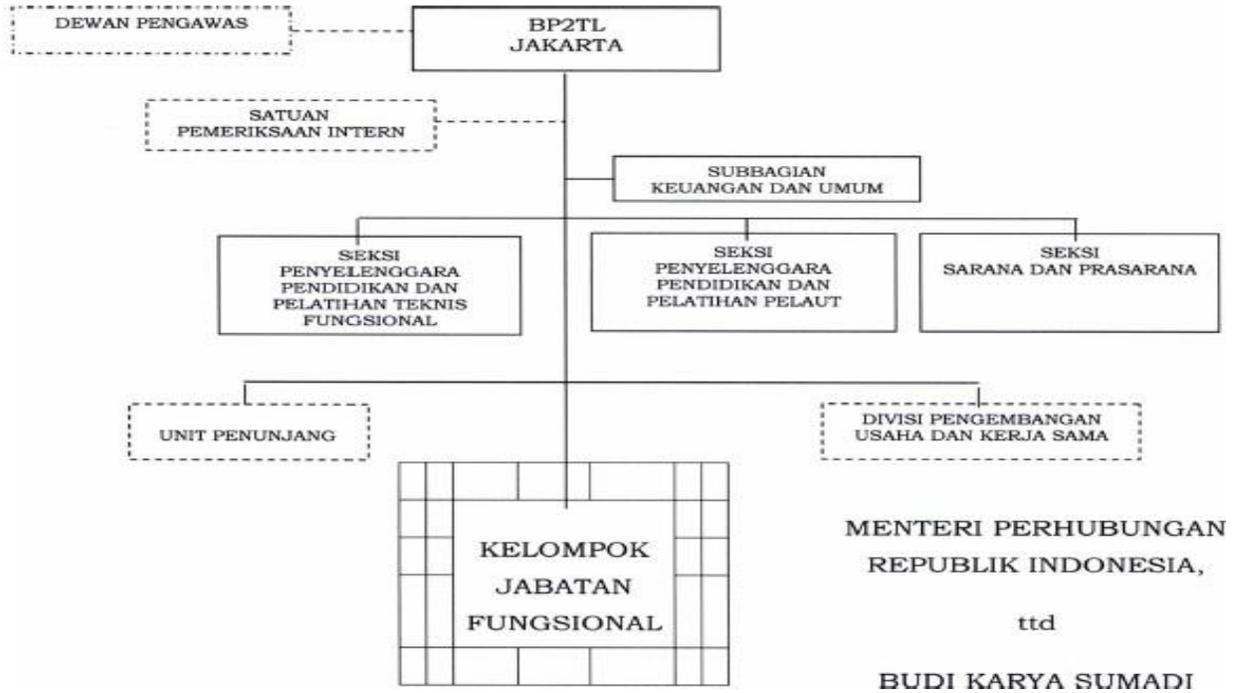
Organisasi BP2TL Jakarta terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Satuan Pemeriksaan Intern;
- c. Subbagian Keuangan dan Umum;
- d. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional;
- e. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pelaut;
- f. Seksi Sarana dan Prasarana;
- g. Divisi Pengembangan Usaha dan Kerja Sama;
- h. Unit Penunjang; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi BP2TL Jakarta sebagaimana dimaksud pada aturan yang sudah, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Apabila diamati dengan seksama Struktur Organisasi dibawah ini yang terdapat di BP2TL Jakarta, dipegang oleh Kepala dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disingkat BP2TL Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT JAKARTA**



**Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dan Tata Kerja BP2TL Jakarta**

**Sumber :** Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2017

#### 1.4 Ruang Lingkup Perusahaan

Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) merupakan salah satu dari Delapan UPT Diklat Laut milik Kementerian Perhubungan, yang berbasis kompetensi memiliki tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional dan Manajemen di bidang Transportasi Laut untuk Pegawai Negeri Sipil sub sektor Perhubungan Laut.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) memiliki misi menghasilkan para sub sektor perhubungan laut untuk mendorong Sistem Transportasi yang bertaraf internasional, safety, reliability, speed, serta reliability. Serta memiliki visi melakukan penyusunan program dan rencana kerja, menjalankan administrasi kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, perkantoran, mempublikasikan kebijakan internal yang relevan dengan tupoksi, mengendalikan dan mengembangkan aktivitas diklat, menjalankan kebijakan teknis operasional yang diberikan oleh Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, menjalankan kebijaksanaan teknis administrasi yang diberikan oleh Pusat Pengembangan SDM Perhubungan, melaporkan dan mengevaluasi hasil aktivitas diklat.

Pada tanggal 20 September 2016 Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dalam bidang layanan pendidikan dengan nomor penetapan 709/KMK.05/2016. BLU diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pengertian Badan Layanan Umum (BLU) itu sendiri adalah lembaga di lingkungan pemerintah yang didirikan untuk memberi layanan pada masyarakat berupa ketersediaan barang atau jasa yang didagangkan tanpa memprioritaskan memperoleh laba serta melaksanakan aktivitas berdasarkan prinsip produktivitas dan efisiensi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Badan Layanan Umum (BLU) merujuk Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yaitu lembaga di lingkungan pemerintah yang didirikan untuk memberi layanan pada masyarakat berupa ketersediaan barang atau jasa yang didagangkan tanpa memprioritaskan memperoleh laba serta melaksanakan aktivitas berdasarkan prinsip produktivitas dan efisiensi.

Sejak ditetapkannya Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) menjadi layanan umum secara otomatis Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) juga berkembang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 96 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta. Sejak saat itulah Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) memberikan layanan pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat umum dalam hal ini para pelaut yang bertujuan untuk menciptakan pelaut yang berkualitas dan berkompeten dengan memberikan kualitas layanan yang baik.

Pelaksanaan program diklat pelaut dan masyarakat umum di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta sebagai upaya ikut melaksanakan program pemerintah yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana kondisi geografis Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan. Oleh sebab itu moda transportasi laut memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan nusantara. Sesuai dengan Tupoksi Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta untuk memberikan pendidikan dan latihan kepada seluruh lapisan masyarakat, maka sebagai realisasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dalam bidang kepelautan pelaksanaan program diklat pemberdayaan masyarakat adalah merupakan alternatif sebagai upaya membantu para pelaut yang ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.